



Buletin Parlementaria

Nomor 986/IV/XI/2017 • November 2017

**Agus Hermanto Amati Kebakaran
di Nusantara III Sampai Kondisi Aman**

**Penyeragaman Tarif Listrik
Pelanggan Rumah Tangga
Beratkan Konsumen**



**Ketua DPR Jamin
Sektor Pertanian Jadi
Prioritas Pembangunan
Nasional**

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN

Ketua DPR Jamin Sektor Pertanian Jadi Prioritas Pembangunan Nasional

Ketua DPR RI Setya Novanto memberikan jaminan, bahwa DPR RI akan terus bekerjasama dengan pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional.

Demikian diungkapkannya saat menghadiri Panen Raya di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Senin (13/11/2017). Novanto datang ditemani Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI yang juga Anggota Komisi IV Firman Soebagyo.

“Buktinya dalam APBN 2018, anggaran Kementerian Pertanian kita alokasikan mencapai Rp 22,65 triliun. 85 persen atau sekitar Rp 19,3 triliun digunakan untuk belanja sarana dan prasarana. Seperti pembangunan irigasi, benih, pupuk, asuransi, serta bantuan alat dan mesin pertanian,” jelas Novanto di tengah para

petani yang melakukan panen raya.

Dalam acara tersebut, politisi dari F-Golkar ini juga menjelaskan tentang peningkatan produksi padi nasional. Ia menyebutkan, pada tahun 2016, produksi padi nasional mencapai 79,141 juta ton gabah kering giling. Menurutnya, produksi padi nasional ini merupakan terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. “Sehingga kita tak lagi mengimpor beras. Ini semua berkat Bapak Ibu para petani, termasuk petani di Desa Noelbaki,” sambung Novanto.

Bagi Novanto, sektor pertanian sangat penting. Selain untuk ketahanan pangan nasional, data menunjukkan, sektor pertanian mampu menyerap 35 persen dari total Tenaga Kerja Indonesia. Di NTT sendiri, sekitar 61 persen tenaga kerja berada di sektor pertanian. “Karena itu saya meyakini, jika ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia, harus dimulai dengan mensejahterakan petani,” paparnya.

Novanto berharap, dengan anggaran

yang besar, kedepannya produksi beras nasional terus meningkat. Sehingga negara tidak harus melakukan impor dan petani lokal seperti di Desa Noelbaki bisa diuntungkan.

“Saya yakin, pertanian kita akan terus maju sehingga bisa menjadi lumbung pangan dunia. Karena itu, saya harap seluruh petani, termasuk di Desa Noelbaki, tetap semangat berproduksi dan memelihara lahan,” jelasnya.

Novanto juga berpesan agar para petani tidak perlu takut dengan harga gabah. Novanto menjamin, DPR RI dan pemerintahan Presiden Jokowi sangat memperhatikan petani. “Kita pastikan para petani semakin sejahtera, sehingga bangsa Indonesia semakin makmur sentosa,” tutur Novanto.

Kedatangan Novanto disambut Ketua Kelompok Tani “Usaha Bersama Air Sagu” Desa Noelbaki Octori Gaspresz, Wakil Bupati Kupang Korinus Masneno, Ketua DPRD Kabupaten Kupang Yosep Lede serta para petani Desa Noelbaki. ■

(ann/mp), Foto: Jeka



Ketua DPR RI Setya Novanto memberikan kata sambutan pada acara panen raya di NTT.



Agus Hermanto Amati Kebakaran di Nusantara III Sampai Kondisi Aman

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengamati langsung penanganan kebakaran yang terjadi di lantai II Gedung Nusantara III DPR. Di masa reses ini unsur Pimpinan DPR yang *standby* memang hanya dia, oleh sebab itu dia akan memastikan kondisi gedung benar-benar tertangani sampai dengan tuntas dan aman. Agus juga memberikan keterangan, bahwa api sama sekali tidak membakar dokumen yang ada.

“Dokumen tidak ada yang terbakar, itu hanya ruang pertemuan untuk teknisi. Saya akan mengamati kebakaran ini, sampai ini betul-betul terselesaikan dengan baik,” jelas Agus kepada para awak media, di lobi gedung Nusantara III, sesaat setelah terjadi kebakaran, Selasa (14/11/2017).

Sampai sekitar pukul 12.00 kondisi sudah tertangani oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pamdal merupakan petugas yang pertama kali sigap menangani api, lalu Pemadam Kebakaran dalam DPR menjalankan tugas pemadaman api sesuai dengan prosedur yang dimiliki dengan dilengkapi alat-alat yang ada.

“Dan kita semua tidak ada korban di sini, sekarang kondisinya sudah tertangani. Pemadam Kebakaran dari luar pun sudah datang. Pemadam Kebakaran yang ada di dalam, termasuk dari Pamdal kita sudah menyelesaikan masalah kebakaran tersebut, tinggal asapnya. Kalau kabel itu kena api kan banyak mengandung asap,” papar Agus.

Sampai saat ini, Pimpinan DPR masih menunggu hasil investigasi dari pihak-pihak yang mengatasi secara langsung. Agus mengatakan, akan memantau sampai kondisi betul-betul aman. “Kita tunggu keterangan dari pihak yang menangani secara langsung, dari Kesetjengan nanti akan memberikan pengumuman, bahwa gedung sudah siap dipakai, atau gedung belum siap dipakai,” ungkapnya.

Mengenai kasus ini, Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti yang juga mendampingi Agus Hermanto, memberikan keterangan bahwa pemeriksaan telah dilakukan secara berkala untuk box-box listrik yang ada di Gedung DPR.

“Dilakukan secara rutin, sebulan sekali. Gedung ini segera akan kita gunakan lagi, karena semua tertangani. Jadi sebenarnya yang mengganggu itu asap, karena banyak barang-barang plastik atau karet dari kabel yang terbakar,” paparnya. ■



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Agus Hermanto memberi keterangan usai mengamati langsung penanganan kebakaran di Lantai 2, Gedung Nusantara III.

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah
ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharjanto
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Djujiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,
Nur Sakila Rahmah, S.Ikom
DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiono
PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon,
Yuliana Puspita, Ifan, Izzu Fauzul Umam
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Pengawasan Parlemen Penting Bagi Pemberantasan Korupsi



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam acara "Forum Anggota Parlemen ke-7" di Markas PBB di Wina, Austria.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, pengawasan adalah salah satu tugas pokok anggota parlemen. Tanpa pengawasan parlemen, kekuasaan pemerintah akan menjadi mutlak, otoriter, yang pada akhirnya membuat rakyat jadi tak berdaya.

Dan jika mengacu kepada "Laporan Parlemen Global IPU 2017", ruang lingkup pengawasan parlemen meliputi tinjauan, pemantauan dan pengawasan badan-badan pemerintah serta lembaga publik, termasuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, anggaran, serta kebijakan pemerintah.

Demikian dikatakan Fadli saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam acara "Forum Anggota Parlemen ke-7" di Markas PBB di Wina, Austria, Kamis (9/11/2017) waktu setempat. Hadir juga dalam forum ini, para anggota parlemen dari sejumlah Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

"Penting sekali bagi anggota parlemen untuk menjaga hak pengawasan tersebut, baik secara individual maupun secara kolektif melalui lembaga parlemen. Sebab, meskipun demokrasi telah membatasi

kekuasaan pemerintah, namun pembatasan itu tak akan ada artinya jika anggota parlemen sendiri rendah kemauan politiknya ataupun lembaga parlemennya sengaja dibikin lemah," tegas Fadli.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, temuan GOPAC menunjukkan bahwa korupsi sebenarnya hanya bisa berkembang jika lembaga pemerintahan lemah, di mana kebijakan serta peraturan yang dibuat bisa diperjual-belikan. Atau karena lembaga pengawas, seperti parlemen, kejaksaan, serta masyarakat sipil, dipinggirkan perannya atau telah menjadi rusak. Pada 2012, *Routledge Research* menambahi temuan tadi, bahwa korupsi juga akan berkembang karena kemiskinan.

"Pada tahun 2013, Transparency International menemukan bahwa dua pertiga parlemen gagal menjadi pengawas korupsi sektor pertahanan.

Sekitar 85 persen parlemen tidak memiliki pengawasan ketat terhadap kebijakan pertahanan. Biaya global untuk korupsi semacam itu diperkirakan sekitar US\$ 20 miliar per tahun," imbuh Fadli.

Menurut Fadli, setiap tahun, uang sogokan yang beredar di seluruh dunia diperkirakan sekitar US\$1 triliun, dan sekitar US\$2,6 triliun, dari uang hasil korupsi yang terkumpul. Jumlah itu setara dengan lebih dari 5 persen PDB global. Hal itu dinilai terjadi karena lemah dan tidak efektifnya pengawasan parlemen.

"Untuk mengatasi persoalan tersebut, GOPAC percaya bahwa kapasitas anggota parlemen harus segera diperbaiki dan sistem pengawasan parlemen lebih diperkuat. Tentu saja tantangannya tidaklah mudah. Parlemen adalah sebuah lembaga politik di mana anggotanya berasal dari berbagai aliran dan ideologi politik. Itu sebabnya untuk memberantas korupsi kita membutuhkan sebuah jaringan internasional yang non-partisan," urai Fadli.

Untuk meningkatkan kapasitas anggota parlemen dalam gerakan antikorupsi, GOPAC telah bekerjasama dengan sejumlah lembaga internasional,



seperti PBB, Bank Dunia, IMF, dan lain-lain. Terkait dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), GOPAC berpandangan jika agenda tersebut ingin berhasil, maka kita harus bisa memerangi korupsi. Parlemen dan anggota parlemen harus bisa memastikan bahwa setiap dana publik, berhasil disampaikan kepada mereka yang berhak.

“Pengawasan oleh parlemen sungguh berarti banyak dalam mengurangi atau melemahkan peluang terjadinya korupsi. Saya juga mengajak kepada para anggota parlemen dari negara-negara yang hadir untuk memaksimalkan peran mereka dalam mendukung pemberantasan korupsi,” ajak politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Diketahui, sejak 2006 penyelenggaraan Forum Anggota Parlemen ke-7 selalu bersamaan dengan The Conference of the State Parties to the United Nations Convention Against Corruption”, diselenggarakan atas kerjasama antara Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) dengan UN Pacific Regional Anti-Corruption Project (UN-PRAC), UN Office on Drugs and Crime (UNODC), dan UNDP (United Nations Development Programme). ■

(si/mp), Foto :Dok

Hari Pahlawan Menjadi Momentum Lanjutkan Perjuangan Bangsa



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap, peringatan Hari Pahlawan tak sekadar menjadi kegiatan seremonial yang diperingati setiap tahunnya. Menurutnya, selain mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan, peringatan Hari Pahlawan harus dijadikan momentum untuk melanjutkan perjuangan bangsa.

“Sebuah ungkapan mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. Ungkapan ini mengingatkan sekaligus mengajak kita untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pejuang kemerdekaan, para pahlawan bangsa,” kata Taufik dalam rilis yang diterima Parlemen, Jumat (10/11/2017).

Meski perjuangan kemerdekaan telah usai, tambah politisi F-PAN itu,

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepahlawanan tak pernah selesai. Pahlawan di masa lalu berjuang mengusir penjajah yang melakukan penindasan, tindakan sewenang-wenang, serta merampas sumber daya alam Indonesia.

“Saat ini, Indonesia sudah merdeka, sudah tidak ada penjajah dalam arti fisik. Namun, perjuangan belum selesai. Masih ada penjajahan dalam bentuk lain yang harus kita merdekakan,” tegas Taufik.

Taufik menilai, Indonesia membutuhkan sosok pahlawan yang berjuang untuk membebaskan kebodohan, kemiskinan, serta mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih, bangsa asing yang terus berupaya mengintervensi, memecah belah, dan merampas kekayaan alam Indonesia.

“Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah buah perjuangan dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Cara kita untuk mensyukurinya, melanjutkan perjuangan, menjadi pahlawan untuk melawan kemiskinan, kebodohan, dan kemajuan bangsa,” dorong Taufik.

Menurutnya, dalam setiap perjuangan bangsa dan peradaban, biasanya terdapat tiga tahapan, yakni generasi pejuang, generasi pembangun, dan generasi penikmat kemerdekaan. Namun, ia berharap, tahapan perjuangan dan bangunan peradaban Indonesia tak pernah sampai pada generasi penikmat.

“Kita wajib bersyukur, tapi tak boleh puas. Biasanya, hancurnya sebuah peradaban disebabkan oleh generasi penikmat, generasi yang lupa akan cita-cita dan nilai luhur perjuangan bangsa. Indonesia lahir dengan cita-cita besar, diantaranya berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kedamaian dunia,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■

(si/sc) foto: runi



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Forum Legislasi bersama Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu.

Fahri Hamzah Yakin Polri Bisa tangani Korupsi

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meyakini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bisa menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Negara pun harus mempunyai sikap terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang memenuhi dasar filsafat hukum dan kepastian hukum.

Menurutnya, banyak pemimpin dunia memuji kerja Polri dan pertumbuhan dari kultur Kepolisian RI yang keluar dari ABRI, lalu kemudian membangun institusi penegakan hukum sipil sesuai dengan amandemen konstitusi. Kemudian 15 tahun setelah amandemen konstitusi telah mentransfer dirinya menjadi kekuatan penegakan hukum

sipil yang luar biasa dan canggih.

“Jadi kalau saya *merem*, polisi sudah bisa, disuruh kerja apapun, polisi itu sudah bisa. Polisi kita itu harus segera dikasih tahu kepada masyarakat bahwa polisi kita itu polisi kelas dunia,” katanya, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Fahri mengutarakan pekerjaan Kepolisian menurutnya tidak dapat

dinilai gampang dan jarang dipuji, seperti menyelamatkan nyawa orang dan sebagainya, semua dikerjakan. Mulai orang beranak sampai terorisme. “Jadi polisi kita ini harus diapresiasi dan kalau sekedar untuk memberantas korupsi sudah jago. *Kasih aja ke kepolisian*,” paparnya.

Selanjutnya, dia menyarankan Kepolisian segera membentuk unit khusus penindakan tindak pidana korupsi yang dapat bekerja di seluruh penjuru tanah air.

“Dia (Polri) cuman perlu punya unit saja. Dan saya usulkan unit itu jangan terlalu berbeda dengan direktorat yang sudah ada sekarang. Tapi ditingkatkan statusnya, personilnya ditambah, supaya dia bisa ada di seluruh Indonesia, sehingga efek kedisiplinan kepada masyarakat kita itu luas,” paparnya.

Tata cara kerja dari unit tersebut haruslah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Fahri menerangkan proses penegakan hukumnya *pro-justicia* itu harus melalui proses penegakan hukum yang ada di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Apalagi sebentar lagi sudah akan ada KUHP dan KUHP.

“Ya sudahlah, bukunya harus satu. Kitab Undang-Undanganya harus satu. Aparatnya satu. Itu yang memenuhi syarat pasal 27 UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan,” tegasnya.

Kemudian Fahri menekankan, negara harus punya satu sikap dengan hukum, harus memenuhi dasar-dasar filsafat hukum, dan kepastian hukum harus ada. Caranya pembahasannya antara Presiden, Kepolisian, Menteri PAN RB dan Kementerian Keuangan.

“Terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, kita harus percaya, kita tidak punya pilihan, kalau tidak percaya sama polisi mau percaya sama siapa. Kita harus percaya kepada lembaga ini,” tandasnya. ■

(es/sc), Foto: Andri

Pemerintah Disarankan Ambil Sikap Matang untuk Pergantian Panglima TNI

Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyiapkan pengganti Gatot pun bermunculan. Sebagai mitra kerja TNI, Komisi I DPR RI menyarankan pemerintah mengambil sikap matang soal pergantian Panglima TNI itu.

“Saya serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Karena beliau yang paling tahu kapan yang paling tepat pergantiannya. Jadi ini urusan pertahanan negara, tidak boleh *grusa-grusu*,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid usai Rapat Paripurna



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid.

di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Meski menyarankan agar tidak *grusa-grusu*, Politisi F-PG itu mengingatkan, pergantian Panglima TNI juga jangan terlalu lama. Meutya yakin Presiden Jokowi dapat memutuskan secara arif terkait hal ini.

“Tidak boleh juga berlama-lama. Jadi, dua prinsip itu, tidak boleh *grusa-grusu* dan tidak boleh lama-lama. Silahkan Presiden menimbang waktu yang paling tepat dengan situasi kondisi politik dan juga negara saat ini. Inisiatif beliau lah yang memutuskan siapa yang paling tepat,” imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai nama pengganti Gatot, politisi asal dapil Sumut itu mengaku belum tahu. Bahkan juga belum masuk ke Komisi I DPR. “Saya belum cek karena hari ini baru masuk. Tapi setahu saya belum,” tutup mantan wartawan itu.

Sebagaimana diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Presiden Jokowi segera memproses pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo karena masa bakti yang mendekati pensiun. Gatot sendiri menjabat sebagai panglima TNI sejak 8 Juli 2015, dan akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang. ■

(si.mp), foto: Andri

Pemerintah Mestinya Beri Pilihan, Bukan Paksa Bayar dengan E-Toll



Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro.

Guna mempercepat transaksi di gerbang tol, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mulai mewajibkan pembayaran non tunai menggunakan kartu uang elektronik atau e-toll. Aturan tersebut mulai diberlakukan 31 Oktober 2017 diikuti terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 26/PRT/M/2017.

Namun, kebijakan tersebut ternyata belum bisa diterima di semua lini masyarakat. Di daerah Surabaya dan Malang misalnya banyak masyarakat yang menolak pembayaran dengan e-toll. Pasalnya masyarakat masih memahami Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

“UU 7/2011 tentang mata uang, pasal 22 mengatakan alat transaksi yang sah di negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah uang rupiah, yang dimaksud mata uang rupiah adalah (uang kertas atau logam) bukan e-toll. Sehingga masyarakat pengguna jembatan Suramadu tetap beranggapan pembayaran yang sah itu dengan rupiah,” ungkap anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang II, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Seharusnya, lanjut Nizar, pemerintah memberikan pilihan kepada masyarakat, bukan memaksa masyarakat membayar dengan memakai e-toll, terlebih hal itu tidak memiliki dasar hukum.

“Tidak semua keputusan menteri bisa diberlakukan di masyarakat. Masyarakat pengguna jembatan Suramadu ingin ada sebuah pilihan. Masyarakat bukan hanya dipertontonkan untuk diwajibkan membayar dengan memakai e-toll tetapi ada juga pilihan untuk memakai uang rupiah,” jelasnya.

Maka dari itu, politisi F-Gerindra itu sangat berharap permasalahan ini bisa ditindaklanjuti, jangan sampai kita mendukung program pemerintah yang dasar hukumnya tidak ada. ■

(rmm.mp), foto: kresno



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo (depan).



Indonesia Kekurangan Penyuluh Pertanian

Komisi IV DPR RI menemukan masih kurangnya tenaga penyuluh pertanian di Provinsi Jambi, padahal penyuluh pertanian merupakan salah satu ujung tombak pembangunan pertanian dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendampingi dan membantu petani.

“Tapi negara tidak menganggap kurangnya penyuluh ini penting. Kunjungan Komisi IV DPR ini membuktikan bahwa ternyata apa yang kami tangkap ini benar. Temuan ini akan dibawa ke dalam rapat kerja dengan pemerintah agar ada langkah penting untuk segera dibuat peraturan pemerintah untuk pengadaan penyuluh pertanian,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo usai berdialog dengan petani jagung di lahan pengembangan jagung hibrida di Kelurahan Tanjung, Kabupaten Muaro Jambi, Kamis (26/10/2017).

Tim Kunker Komisi IV juga menerima pengaduan dari perwakilan petani jagung yang mengadukan kurangnya bimbingan dari penyuluh yang memang masih mereka perlukan.

Lebih lanjut Edhy menjelaskan bahwa Indonesia sekarang kekurangan 43 ribu Penyuluh Pertanian, dan untuk Penyuluh Kehutanan memerlukan 5 ribuan orang. Sehingga bila dijumlahkan ada sekitar 50.000 tenaga kerja baru yang dibutuhkan. “Kenapa bisa bikin banyak Perpu ini itu, kok yang penyuluh tidak. Bagi kami sangat *urgent*, kalau tidak ada penyuluh ancamannya adalah ketahanan pangan kita terganggu, maka kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturannya.” papar Edhy.

Pada kunjungan di lahan reklamasi gambut ini Tim Kunker Komisi IV juga mengapresiasi digunakannya bibit jagung karya anak bangsa yaitu Nakula Sadewa dan Bima 12 yang merupakan program Untuk Rakyat Indonesia (URI). ■

(ran/ss), foto: Rizka

Pemerintah Harus Bisa Atasi Diskriminasi Uni Eropa Terhadap Kelapa Sawit

Anggota Komisi IV DPR RI Taufiq R. Abdullah mengharapkan, pemerintah sejatinya bisa mengatasi bahkan mengantisipasi terjadinya tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa.



Anggota Komisi IV DPR Taufiq R. Abdullah.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Uni Eropa menghentikan diskriminasi terhadap kelapa sawit saat berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa kemarin di Filipina.

“Sebenarnya permasalahan kelapa sawit ini bukan barang baru bagi kita,

dan harusnya itu bisa diatasi bahkan diantisipasi oleh pemerintah. Sebagai produsen kelapa sawit kitalah yang seharusnya bisa mengatur pasar. Kedua, negara juga harus berpikir produksi sawit tidak dilempar ke pasar internasional dalam bentuk bahan mentah. Harus ada upaya dari negara untuk menciptakan industri-industri olahan, sehingga petani sawit dapat melempar ke pasar dalam

harga yang maksimal. Di Indonesia ada industri pengolahan sawit, harganya akan lebih mahal daripada kita ekspor. Bayangkan kita yang memproduksi tapi ketika dilempar ke pasar internasional harus melalui negara-negara yang bukan produsen,” papar Taufiq sesaat sebelum memasuki ruang Sidang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Dilanjutkan politisi Fraksi PKB ini, diskriminasi terhadap kelapa sawit itu terjadi karena Indonesia lemah. Kita tidak memiliki jaringan yang kuat di internasional. Sehingga Indonesia harus memegang jejaring ini. Disamping itu pemerintah juga harus melakukan upaya diplomasi, serta harus interaksi dengan produsen sawit itu sendiri. Karena berbicara pasar tentu kita bisa melakukan upaya agar jangan sampai mereka yang menentukan pasar.

Sebagaimana diketahui, dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta Uni Eropa menghentikan diskriminasi terhadap kelapa sawit. Kampanye hitam terhadap kelapa sawit dianggap merugikan baik ekonomi, maupun citra negara produsen sawit.

Hal tersebut dikatakan presiden saat berbicara di KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa di Manila, Filipina, Selasa (14/11) kemarin. ■

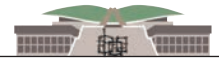
(ayw/mp), foto: kresno



Anggota Komisi IV DPR, Erma Suryani Ranik.

Jelang Pilkada 2018, Polda Diminta Adil

Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik mengapresiasi kinerja Polda Kalimantan Barat terkait banyaknya terobosan-terobosan dalam penegakan hukum. Namun dirinya juga meminta Polda Kalbar bersikap adil kepada seluruh kontestan Pilkada Kalbar.



Komisi V Dorong Difungsikannya Terminal Liwas di Manado



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono, di Manado.

Terminal Tipe A Liwas di Manado, Sulawesi Utara (Sulut) dibangun sejak 2012, dengan target selesai tahun ini dan akan dioperasikan pada awal tahun 2018. Saat ini pembangunan telah rampung namun belum dioperasikan karena masih ada kendala pembebasan lahan untuk akses jalan menuju terminal dan masih adanya perumahan warga yang bersebelahan dengan terminal.

“Saya ingin pihak kepolisian dalam rangka menyambut pilkada 2018 ini bisa memastikan mengedepankan prinsip hukum. Polisi harus bersikap adil, terhadap semua kontestan, baik itu kontestan dari parpol atau kontestan yang berasal dari perseorangan di tiap kabupaten/kota,” tutur politisi Demokrat. Selain itu, Erma juga menginginkan kinerja Polda Kalimantan Barat untuk terus membuktikan dapat menjaga keamanan menjelang Pilkada 2018.

“Saya ingin kerja-kerja Pak Kapolda, yang sudah dibuktikan dengan menjaga keamanan paska dinamika 20 Mei 2017 lalu bisa juga berlanjut kepada Pilkada

2018. Sehingga ketika Pilkada pada Juni 2018 ini, teman-teman di Polda ini sudah mantap untuk mengedepankan satu saja urusan hukum, tanpa melihat partai politikah, atau calon perseorangan,” kata Erma.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Provinsi Kalimantan Barat Erwin Triwanto menyatakan siap melakukan segala tugas yang diberikan, terutama dalam menghadapi tahun politik. Sebelumnya, Erwin juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan motivasi yang diberikan Komisi III DPR RI. ■

“Permasalahan pembebasan lahan untuk akses menuju terminal ini diharapkan segera mendapat jawaban dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena terminal ini harus segera difungsikan sebelum rusak lagi,” jelas Wakil Ketua Komisi V DPR Anton Sukartono, di Manado, Kamis (26/10/2017).

Lebih lanjut Anton menambahkan, karena Terminal Liwas sangat dibutuhkan masyarakat sekitar demi hajat hidup orang banyak, terminal harus segera dioperasikan agar tidak terbengkalai. Semua pihak baik pemerintah daerah mulai provinsi maupun tingkat pusat harus berkolaborasi mencari solusi terbaik.

Sementara itu di waktu yang sama Direktur Prasarana Perhubungan RI Wahjuningrum menjelaskan, terminal belum bisa dioperasikan karena masih adanya beberapa komitmen yang belum bisa dilaksanakan. Oleh karena itu Wahjuningrum berharap agar kedatangan Tim Kunker Komisi V DPR RI bisa membantu mencarikan solusi.

“Kami sudah menjalankan sesuai komitmen masing-masing, agar terminal bisa dioperasikan sesuai jadwal awal tahun 2018, permasalahan pembukaan jalan akses menuju terminal dan penutupan jalan akses menuju perumahan agar segera diatasi dan pemerintah kota harus segera mereview angkutan kota,” tutur Wahjuningrum

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menjelaskan permasalahan terminal yang belum bisa dioperasikan agar bisa dikomunikasikan lebih lanjut. “Tidak ada yang tidak bisa dilakukan buat kemaslahatan masyarakat luas jika komunikasi terjaga dengan baik,” jelas Olly. ■

(ndy/sc), foto: kresno

(do/sc), foto: doeh

Legislator Usulkan Bentuk TPF Penyanderaan di Papua



Anggota DPR RI Anggota DPR RI Jimmy Demianus Ijie.

Anggota DPR RI Jimmy Demianus Ijie mengusulkan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kasus penyanderaan 1.300 warga sipil di Tembagapura, Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Demikian diungkapkannya pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dengan agenda Pembukaan Masa Sidang II TS 2017 - 2018 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Dalam interupsinya, Jimmy mengatakan perlu dicermati dengan bijak sumber kepemilikan senjata yang kini dipegang puluhan anggota KKB yang digunakan untuk menyandera 1.300 warga Desa Kimbely dan Desa Banti.

"Kita perlu amati dengan seksama,

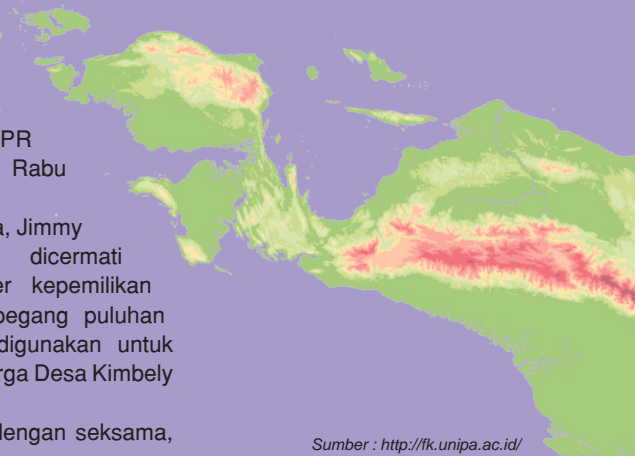
apakah itu senjata rampasan atau ada yang justru memasok senjatanya. Karena itu, saya usulkan dibentuk tim pencari fakta," ungkap Jimmy.

Lebih lanjut, Politisi dari dapil Papua Barat ini menyampaikan, bahwa terlalu sering masyarakat Papua dalam hal ini Organisasi Papua Merdeka (OPM) disalahkan ketika terjadi peristiwa di Papua. Padahal, sambungnya, bukan rahasia lagi kalau Papua adalah tempat untuk mendapatkan pangkat dan jabatan bagi oknum yang berkepentingan.

"Ini bukan rahasia lagi, ada OPM yang benar-benar OPM dan ada OPM bentukan sekedar untuk mendapatkan pangkat. Mari kita cari fakta, sekali lagi jangan hanya lihat Papua dari koran, televisi dan radio, tetapi mari kita datang ke sana supaya dapat gambaran yang sebenarnya," tegas politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Diakhir pernyataannya, ia menekankan bahwa dirinya setuju menebas jika memang ada upaya-upaya untuk memisahkan tanah Papua dengan NKRI. "Tetapi, jangan sampai dibalik alasan-alasan itu, lalu kita membenarkan semua cara. Mari kita bentuk tim pencari fakta dengan baik dan benar. Kita temukan benarkah senjata-senjata ini rampasan atau tidak," tandasnya. ■

(amn/sc)



Sumber : <http://fk.unipa.ac.id/>



Dalam kunjungan ke Bumi Cenderawasih itu, Komisi VIII DPR memberikan apresiasi terhadap kehidupan umat beragama di Papua yang berjalan harmonis. "Banyak hal yang disampaikan oleh Pemprov Papua, soal agama. Ada hal yang harus diperhatikan secara serius, mengingat harmonisasi yang ada di Papua berdasarkan pada pendekatan-pendekatan adat," ucap Noor Achmad di ruang kerja Sekda Papua, Kamis (2/11/2017).

Terkait masalah sosial, Noor Achmad mengatakan bahwa berdasarkan laporan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, ada beberapa Kabupaten dan Kota yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Semestinya semua masyarakat dapat tersentuh oleh program tersebut. "Ini menjadi masukan yang cukup baik



Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII yang di Pimpin Noor Achmad saat melakukan pertemuan dengan mitra kerja di Papua.

Komisi VIII DPR Apresiasi Kehidupan Umat Beragama di Papua

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Provinsi Papua, Noor Achmad menyampaikan bahwa tujuan kedatangan Komisi VIII DPR ke Papua adalah untuk mendengarkan secara langsung segala aspirasi dan permasalahan yang dihadapi oleh beberapa instansi yang merupakan mitra kerja Komisi di daerah.

untuk nanti disampaikan dalam sidang berikutnya,” ujarnya.

Aspirasi lain yang diperoleh Komisi VIII DPR yaitu dari BPBD yang menyampaikan tentang luasnya area di wilayah Papua sehingga memerlukan kebijakan khusus, terutama mengenai peralatan pendukung.

“Kami juga perlu mengapresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih perlu penanganan serius,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia I Loupatty mengatakan, dalam pertemuan dengan Komisi VIII DPR

RI itu juga dibahas mengenai masalah kepegawaian. Dimana untuk Papua diharapkan ada perlakuan khusus sehingga orang asli Papua yang diprioritaskan.

“Dalam prakteknya, jika yang diterima adalah orang-orang non Papua setelah bekerja beberapa tahun kemudian mereka minta pindah. Sehingga sangat merugikan pemerintah daerah Papua,” ungkap Elia. ■

(dep.mpp/ivv)



Anggota DPR RI Komisi VII Rofi Munawar.

Penyeragaman Tarif Listrik Pelanggan Rumah Tangga Beratkan Konsumen

Rencana Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan menghapus kelas golongan pelanggan listrik Rumah Tangga (R-1) dari daftar golongan pelanggan tarif adjustment (non-subsidi) menuai kritik dari Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar. Dirinya menilai kebijakan ini dipastikan akan memberatkan sebagian besar konsumen rumah tangga.

“Penyeragaman tarif dilakukan bersamaan dengan kenaikan tarif yang telah dijalankan oleh PLN setiap triwulan di tahun 2017. Bisa dibayangkan bagaimana beratnya konsumen menerima kebijakan ini,” tutur Rofi Munawar dalam berita rilisnya di Jakarta, Senin, (13/11/2017).

Rofi memaparkan, saat ini golongan 900 VA-RTM membayar listrik Rp. 1.352 per KWh. Sedangkan golongan 1300 dan 2200 per KWh membayar listrik Rp. 1.467 per KWh. Meski Pemerintah beralasan kenaikan

ini selisihnya relatif kecil antar golongan, namun sudah dipastikan akan menambah konsumsi rutin.

“Skema ini dilakukan untuk memaksa pelanggan menaikkan daya ke 1300 dan 2200. Dengan kenaikan tersebut pelanggan dipaksa juga agar lebih efisien terhadap penggunaan listrik,” tegasnya.

Rofi juga beralasan langkah penyeragaman tarif sesungguhnya sedang menunjukkan bahwa kinerja PT. PLN tidak efisien. Permasalahan utama skema ini pada akhirnya justru pada kemampuan elektrifikasi dari PLN. Karena ruang penggunaan listrik akan

lebih besar, daya pasang tersambung harusnya lebih besar lagi.

“Ironisnya saat ini PLN saja sering tidak mampu memenuhi daya pasang tersambung, kondisi listrik sering ‘byarr pett’. Di sisi lain masyarakat belum terlatih dengan cara-cara untuk menghemat listrik,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menghapus daya listrik di bawah golongan 4.400 Volt Ampere (VA). Sehingga, pelanggan rumah tangga hanya akan menjadi satu golongan. ■

(depmp) Foto : Rilis

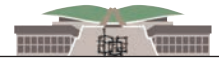
Kaltara Belum Miliki Rumah Aman

Kota Tarakan di Kalimantan Utara (Kaltara) sampai kini belum memiliki rumah aman. Padahal, kasus-kasus kekerasan begitu tinggi terjadi. Setidaknya, ditemukan 34 kasus kekerasan pada Januari hingga Juni 2017. Kasus kekerasan yang terjadi didominasi kekerasan rumah tangga dan seksual.

Para korban kekerasan tersebut biasanya langsung dirujuk ke Jakarta, karena Kaltara belum ada rumah aman untuk merehabilitasi para korban kekerasan. Demikian terungkap dalam pertemuan Tim Kunjungan



Tim Kunjungan Komisi VIII yang di Pimpin Sodik Mudjahid saat melakukan pertemuan di ruang serbaguna gedung Pemerintahan di Kalimantan Utara.



Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI dengan Sekda, Wali Kota, Ketua DPRD, Kakanwil Agama, Kadinsos, dan Kadin PP dan PA yang digelar di Ruang Serbaguna, Gedung Pemerintah Kota Tarakan, Selasa (31/10/2017).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang memimpin Tim Kunker ini Sodik Mudjahid mengatakan, fasilitas yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memang sudah ada item anggarannya di APBN melalui Kementerian Sosial. "Tinggal alokasinya, apakah Provinsi Kaltara kebagian atau tidak. Ini semua tergantung lobi dari gubernur atau perwakilannya," kata Sodik.

Sementara Anggota Komisi VIII dari

Fraksi Partai Amanat Nasional Desy Ratnasari mengatakan, bahwa untuk Provinsi Kaltara termasuk Kota Tarakan, memang sampai saat ini tidak memiliki rumah aman (safe house) untuk korban kekerasan anak dan perempuan. Padahal, untuk melakukan rehabilitasi akan lebih mudah dilakukan di rumah aman. Selain itu, rehabilitasi lebih terfokus untuk mengontrol trauma healing dengan terapi psikologis.

"Keamanan dalam diri si korban bisa dikontrol agar terkendali," imbuh Desy. Di Kota Tarakan sendiri belum ada dan tentu ini menjadi perhatian Komisi VIII. Ia berharap segera dibangun rumah aman atau setidaknya tempat khusus untuk para

korban, lanjutnya.

Siti Hadijah salah seorang staf Analis Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengakui, Kaltara memang belum memiliki tempat rehabilitasi untuk korban kekerasan.

"Pada saat kami menangani masalah anak, bingung mau dibawa ke mana korban ini. Dan kalau ditangani sendiri tidak optimal," imbuh Hadijah.

Selama ini bila kasusnya cukup serius, maka dinas setempat langsung membawa korban ke Jakarta. "Jauh sekali kalau korban harus dibawa ke Jakarta. Pastinya kami tidak bisa mengontrol lagi dan bagaimana perkembangannya selanjutnya," akunya. ■

(hr/sc)

BUMN Diminta Jangan Reaksioner dengan Wacana Go Public

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menilai masuknya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ke bursa saham, tidak otomatis membuat perusahaan plat merah tersebut tambah untung dan terbuka dalam pengelolaannya. Beberapa BUMN yang terlanjur go public ternyata malah tercatat mengalami kerugian yang serius.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul adanya wacana seorang Menteri yang dilansir beberapa media yang ingin mendorong BUMN Energi, yaitu Pertamina dan PLN, go public. Alasannya agar terjadi transparansi dan meningkatkan keuntungan.

"Masuknya BUMN ke bursa saham ternyata tidak otomatis membuat perusahaan plat merah tambah untung dan terbuka dalam pengelolaannya. Beberapa BUMN yang terlanjur go public ternyata malah tercatat mengalami kerugian yang serius. Transparansi perusahaan negara tidak lahir seketika dengan melantai di bursa saham," ungkap Rieke dalam siaran persnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/11/2017).

Hal yang paling penting dilakukan menurut Rieke adalah mengembalikan tata kelola BUMN

sesuai dengan arah dan perintah konstitusi UUD 1945. BUMN harus fokus pada *core business* dan *core competency* masing-masing. Patuhi, mana BUMN yang harus fokus pada pelayanan publik pada mencari laba atau pada irisan keduanya.

"Ikuti saja arahan Presiden. Jangan sampai urusan bisnis utama diabaikan, malah sibuk "bisnis printilan", dari buka anak perusahaan catering, binatu, sampai penyalur tenaga kerja. Indikasinya untuk tetap memberi perioritas pada mantan direksi BUMN. Bahkan, terindikasi ranah swasta dan UKM pun diambil. Namanya "mati angin" kalau begitu. Kreatifitas diperlukan bukan untuk menopang hidup para elit BUMN, tapi untuk menjaga kelangsungan hidup BUMN yang bisa memberi kehidupan bagi ekonomi Negara," papar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Baginya, restrukturisasi jauh lebih



Anggota DPR RI Komisi VI Rieke Diah Pitaloka.

penting. Lakukan audit keuangan dan manajemen terhadap induk, cucu dan cicit BUMN. Hal ini jauh lebih penting dibanding keputusan reaksioner go public. Jika hal-hal fundamental restrukturisasi BUMN tidak dilakukan, maka "Go Public" hanya akan membuat BUMN yang awalnya mau untung "malah buntung". Lebih parah lagi, ujungnya-ujungnya BUMN malah jadi parasit negara. ■

(Ayurmp/iv)

Komisi X Dorong Guru Honorer Jadi PNS



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra bersama Wakil Gubernur Abdul Fatah dan Kepala Dinas Pendidikan Pemrov Bangka Belitung M Soleh.

Komisi X DPR RI akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengangkat guru honorer yang ada menjadi PNS. Pasalnya, dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan ada ribuan guru yang pensiun.

“Pada lima tahun ke depan, akan ada 295 ribu guru pensiun. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, harus segera ada pengangkatan guru honorer karena jika tidak akan terjadi kondisi darurat guru,” tegas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) usai pertemuan Tim Komisi X dengan perwakilan Kemendikbud RI, Kemenristekdikti, Kemenpar, Kemenpora, Perpurnas RI, Bekraf RI, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah, Akademisi, dan perwakilan masyarakat, di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (13/11/2017).

Ia meminta agar dalam rekrutmen ini, pemerintah mengutamakan pengangkatan guru honorer yang sudah lama mengabdikan. “Terutama bagi guru honorer yang sudah lama mengabdikan, sudah punya pengalaman mengajar, sudah lama berpengalaman, dan punya

keahlian,” tandasnya.

Menurut politisi Gerindra ini, untuk teknis pengangkatan menjadi CPNS merupakan kewenangan Kemenpan-RB, tetapi pihaknya mendorong agar guru honorer ini didahulukan.

“Pengangkatan menjadi PNS menjadi ranah Kemenpan RB. Apa saja syarat dan kualifikasinya, kami hanya mendorong dan memberikan ruang menjadi skala prioritas untuk guru honorer ini, mulai dari SD hingga SMA,” jelasnya.

Selain menyoroti masalah guru honorer, Sutan juga menyoroti sedikitnya guru di Babel yang bersertifikasi, hanya mencapai 49 persen.

“Sertifikasi guru baru terpenuhi 49 persen artinya lebih 50 persen belum bersertifikasi, artinya kalau begitu kita tahu bagaimana mutu pendidikan di sini. Oleh karena itu sebagai pimpinan kami akan terus mendorong dan menjadi agenda

utama yang terus diperjuangkan dengan PGRI,” tukasnya.

Ke depan, ia akan meminta pemerintah dalam melakukan sertifikasi bagi mereka yang sudah memiliki usia lanjut, jangan disamakan dengan yang masih muda. “Misalnya yang tua, ya nilainya jangan 80 dong, harus ada regulasi dan kebijakan untuk memberikan ruang kepada guru,” imbuhnya.

Ia juga mengapresiasi, alokasi anggaran Pemrov Babel untuk dunia pendidikan sudah lebih dari 20 persen, yakni mencapai 27 persen, artinya kesejahteraan guru pun sudah dipikirkan, khususnya untuk peralihan guru yang kewenangannya dialihkan menjadi kewenangan provinsi sesuai UU 23/2014

Sebelumnya dalam pertemuan dengan Tim Kunker Komisi X, Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul

Fatah menjelaskan, di Babel guru yang bersertifikasi baru terselesaikan 49 persen. Ini artinya rata-rata kualitas tenaga guru kurang memenuhi standar.

“Masalahnya karena asal guru yang mengajar dulu itu adalah tenaga honorer dengan kebijakan diangkat menjadi PNS, mereka kesulitan untuk sertifikasi, ini menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas guru,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemrov Babel M. Soleh menyambut baik rencana yang diusulkan Komisi X ini, dia mengakui untuk memenuhi kebutuhan guru di Babel cukup banyak dibantu dengan guru honorer, yang hampir ada di setiap sekolah baik SD, SMP hingga SMA. “Total guru di Babel keseluruhan (PNS dan non PNS) 14.409 orang,” imbuhnya.

Untuk guru yang bersertifikasi diakui Soleh memang masih rendah, untuk jenjang SD dengan persentase 55,98 persen, guru SMP 38,32 persen, guru SMA baru 34,92 persen, guru SMK baru 29,63 persen dan SLB 27,45 persen. Sementara untuk persentase guru kualifikasi (minimal S1) untuk jenjang SD 75 persen, SMP 84 persen, SMA 93 persen, SMK 88 persen, dan SLB 54 persen. ■

(runisc)

Komisi X Terima Masukan dan Keluhan PTN dan PTS Banten

Tim Kunjungan Kerja Komisi X mendengarkan beberapa masukan dan keluhan yang dihadapi oleh beberapa PTS dan PTN di Banten saat berkunjung ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk bertemu dengan beberapa rektor universitas, Senin (13/11/2017).



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri saat kunjungan kerja ke Banten.

“Kita disini banyak mendengar dan beberapa masukan yang muncul di Komisi ternyata memang dikeluhkan di sini. Misalnya tentang jurnal, bahwa orang yang belajar S3 ataupun Profesor harus mempertahankan gelar profesornya untuk mendapatkan tunjangan kehormatannya kalau dia terus mempublikasikan hasil penelitiannya,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri.

Dalam pertemuan yang dihadiri juga oleh Prof. Intan Ahmad dari

Kemenristekdikti, sempat dibahas juga mengenai kurangnya bidikmisi yang diterima oleh mahasiswa. “Dari 17.000 mahasiswa yang menyampaikan, hanya 5 orang yang mendapatkan bidikmisi. Tentu ini dicatat betul oleh Kementerian,” ujar Fikri.

Selain itu, dalam diskusi tersebut juga disinggung mengenai bantuan untuk perguruan tinggi. “Ternyata Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) di Banten tidak bisa mencukupi untuk Biaya Kuliah Tunggal (BKT) sehingga Uang Kuliah Tunggal (UKT)

harus rendah karena di Banten masih banyak problematika ekonomi bagi masyarakat,” lanjut Fikri.

“Dengan cara lain, penerimaan negara bukan pajak dinaikkan dan seterusnya. Padahal ini harus ada syarat-syarat, misalnya masyarakatnya menerima dengan asas keadilan sesuai dengan UU 20 tahun 1997. Jadi problematika itu kita dengar dan akan kita bawa dalam raker dengan pemerintah pusat,” tutup Fikri. ■

(encu.mp)

Komisi X Apresiasi Bantuan Mobil Perpustakaan Keliling Ke Bengkulu



Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati secara simbolis menyerahkan kunci mobil perpustakaan keliling kepada Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mengapresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat melalui Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memberikan bantuan 3 unit Mobil Perpustakaan Keliling (Pusling) kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Diharapkan di tahun berikutnya bisa bertambah lagi.

Pemberian bantuan tersebut diserahkan secara simbolis bersamaan dengan kedatangan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Bengkulu disaksikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (13/11/2017).

"Kami juga akan mendorong agar Dana Desa bisa dialokasikan untuk pembangunan perpustakaan di setiap desa dalam wilayah Bengkulu," ungkap Politisi PAN ini.

Srikandi Parlemen asal Daerah Pemilihan Bengkulu ini mengakui masih rendahnya tingkat literasi dan minat baca siswa dan masyarakat pada umumnya di Bengkulu. Ia berharap pemberian bantuan Mobil Perpustakaan Keliling bisa menumbuhkan minat baca terutama

pada anak-anak usia sekolah, sehingga berdampak menurunnya prosentase buta aksara di Provinsi Bengkulu.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR lainnya, Dadang Rusdiana mendorong Perpusnas untuk lebih kreatif dalam menarik minat baca anak-anak usia sekolah di Bengkulu. Dirinya juga melihat kondisi geografis sebagian Provinsi Bengkulu yang berbukit dan sulit dijangkau oleh Mobil Perpustakaan Keliling bisa disiasati dengan membuat Perpustakaan Motor Keliling.

"Untuk menembus wilayah yang sulit dijangkau mobil, saya menyarankan Perpusnas melakukan terobosan dengan perpustakaan motor keliling yg beroda tiga," ungkap Dadang.

Politisi Hanura ini juga mengaku prihatin melihat masih rendahnya tingkat

literasi hampir di seluruh wilayah Indonesia yang berada di daerah tertinggal, terluar dan terdepan. Hal ini tentu perlu keberpihakan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

"Kami dari Komisi X akan selalu mendukung upaya pengalokasian anggaran untuk mendorong proses pembangunan di daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan tersebut, khususnya provinsi Bengkulu yang kita kunjungi hari ini," jelas Dadang.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Rohidin Mersyah, atas nama Pemprov Bengkulu juga mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah yang memberikan bantuan tiga unit Mobil Pusling, dengan harapan dapat menumbuhkan minat baca masyarakat di wilayah Bengkulu ini.

"Kami juga berharap Komisi X DPR RI dapat mengupayakan kepada Kementerian terkait, agar Dana Desa bisa dialokasikan untuk Perpustakaan Desa (Pusdes)," pungkasnya. ■

(naeturoji/sc)

Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Ke-4 Di Seluruh Indonesia

Anggota Komisi XI DPR RI Fathan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan nomor 4 di seluruh Indonesia.

“Kami (Komisi XI) mengapresiasi pertumbuhan perekonomian yang bagus, hal ini tidak terlepas dari kerja keras dari masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pusat, serta mitra kerja Komisi XI yang telah bekerja keras meningkatkan perkembangan perekonomian Sulawesi Selatan,” katanya di sela pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan, di Makassar, Senin (30/10/2017).

Namun, Fathan mengatakan, perkembangan perekonomian ini tidak berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang masih tinggi. Komisi XI menyoroti angka kemiskinan yang tinggi yaitu sekitar 9,3 persen.

Untuk itu, Komisi XI minta pemerintah

dan seluruh stakeholder untuk kerja keras mengambil langkah-langkah mengentaskan kemiskinan. “Masyarakat membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga tingkat kesejahteraan bagus dengan hilangnya ketimpangan sosial, dan hilangnya pengangguran,” jelasnya.

Menurutnya, sektor-sektor yang perlu didorong dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, adalah perlu mendorong sektor pertanian sebagai salah satu prioritas, karena Sulsel berbasis pada komoditas seperti kakao dan kopi. “Jika komoditas baik maka pertumbuhan ekonomi juga akan tinggi,” ungkap Farhan.

Selanjutnya, juga perlu adanya industrialisasi pertanian. Jika terjadi peningkatan nilai jual, pengemasan, dan pengolahan yang lebih modern maka



Anggota DPR RI Komisi XI Fathan.

tingkat penjualannya pun akan lebih tinggi.

Lebih lanjut, Komisi XI menyoroti potensi pariwisata Sulawesi Selatan yang sangat luar biasa, seperti Bantimurung dan Toraja. “Ini suatu hal yang sangat penting, ekonomi ditopang dari sektor pariwisata. Dunia menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi salah satu faktor untuk mengurangi kemiskinan,” ujarnya.

Selain itu, ditetapkannya Sulsel masuk dalam daerah strategis nasional maka peningkatan infrastruktur, seperti jalan tol dan jalur kereta api sebagai konektivitas antar daerah juga menjadi hal yang penting dalam upaya peningkatan ekonomi. ■

(es/sc)

Perlu Ditemukan Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru di Kepri

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menilai perlu ditemukannya mesin pertumbuhan baru yang bisa segera diimplementasikan. Hal tersebut dipandang sebagai sumber penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Saya kira memang yang menjadi inti sebelum kita bicara pada tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kepri, yaitu agar menemukan mesin pertumbuhan baru yang segera bisa diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepri ini,” ujar Andreas saat rapat dengan jajaran mitra kerja komisi XI DPR dalam



Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo.

rangka kunjungan kerja di Batam, Kamis (26/10/2017).

Pada saat pertemuan, politisi asal F-PDIP ini turut menyayangkan data yang ditampilkan BPS (Badan Pusat Statistik) tidak ‘update’ dengan kondisi Provinsi Kepri

saat ini. “Saya heran dengan data yang diberikan oleh BPS, di sini tertulis jumlah tenaga kerja di Kepri sebesar 250 ribu. Sedangkan dari data yang saya punya, sangat menurun sekali yakni hanya sebesar 26 ribu,” jelasnya.

Lebih lanjut ia juga mempertanyakan sedikitnya jumlah industri pada sektor perikanan, pariwisata dan industri berbasis sektor maritim yang ada di Provinsi Kepri. Ia berharap Pemprov dan Pemda tidak hanya mengandalkan dana APBD tapi juga tetap memperhitungkan banyaknya investasi yang masuk yang bersumber pada sektor industri tersebut.

“Comparable tenaga kerja dengan tingkat hidup di Batam itu susah sebetulnya. Mengemang industri yang bergerak pada sektor maritim jika tidak banyak dieksplor juga harus dilihat insentif yang harus diberikan oleh Pemerintah Pusat termasuk insentif terpadu dan lainnya. Ini harus secara keseluruhan,” ujarnya. ■

(tra/sc) foto: iana



Persaudaraan Istri Anggota berfoto bersama dengan pembicara usai seminar dengan tema Diet Menurut Genetik dan Deteksi Dini Penyakit Jantung di Ruang KK IV Gedung DPR.

Seminar Diet Genetik PIA DPR RI Diharapkan Bermanfaat

Ketua Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI Deisti Astriani Novanto berharap dengan digelarnya seminar kesehatan tentang Diet Menurut Genetik dan Deteksi Dini Penyakit Jantung dapat memberikan pemahaman kepada ibu-ibu istri Anggota dan menyebarkannya kepada masyarakat luas.

Hal tersebut diungkapkannya usai menghadiri Seminar Kesehatan yang digelar PIA DPR RI dengan tema; Diet Menurut Genetik dan Deteksi Dini Penyakit Jantung, dan menghadirkan pembicara dr. Cindiawaty J Pudjiadi MARS, MS, SpGK (Spesialis Gizi Klinik Rs Medistra), dan dr. Sri Shujuan, Sp.

PD, KKV. (Dokter Spesialis Penyakit Dalam – Kardiovaskular RS Medistra). Seminar dilaksanakan di ruangan KK IV Gedung Nusantara, Senayan Jakarta. Rabu (15/11/2017).

Dijelaskan Deisti, kegiatan seperti ini kerap diadakan oleh PIA DPR RI, dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Tema diet menurut

genetik, diangkat, pasalnya menurut dia kesehatan sangat penting dan nomor satu bagi keluarga. Namun, kerap kali para ibu salah dalam memahami dan mengambil tindakan.

“Kadang-kadang kita suka salah dalam melihat persoalan, misalnya mau diet untuk penyakit atau untuk kurus. Kadang-kadang ada yang sampai tidak makan garam, tetapi akhirnya malah menimbulkan penyakit lain. Akhirnya kami berfikir bahwa sudah waktunya ibu-ibu menambah ilmunya dengan mendatangkan dokter gizi, sehingga tahu diet yang benar, tidak akan ada efek di kemudian hari,” paparnya.

Dalam seminar tersebut juga ada



pemeriksaan deteksi dini penyakit jantung. Soal penyakit jantung sendiri merupakan penyakit pembunuh pertama di dunia. Apalagi jika dikaitkan dengan kinerja para Anggota DPR RI yang kerap rapat hingga larut malam, makan yang tidak dijaga sehingga menyebabkan kesehatannya, terutama jantungnya bermasalah.

“Kita tahu, para anggota DPR ini kesibukannya padat, kadang-kadang makanannya juga tidak dijaga. Muncul keluhan-keluhan yang kita pikir itu seperti masuk angin, tapi ternyata itu penyakit jantung. Dan kita sebagai istri kita harus tahu apa yang harus kita lakukan,” ucapnya.

Sementara dr. Sri Shujuan, mengatakan, penyakit jantung koroner terjadi karena akibat adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah yang menyuplai makan ke jantung selama 24 jam. Penyakit jantung koroner sendiri menurutnya terjadinya berlangsung lama selama bertahun-tahun. Itu terjadi akibat adanya faktor resiko, prosesnya yang berjalan lambat, dan lambatnya tidak

bergejala, juga gaya hidup (LifeStyle). Namun, Dokter Sri menegaskan, bahwa Penyakit Jantung Koroner (PJK) dapat dicegah.

“Intinya yang paling penting, harus diketahui bahwa penyakit jantung koroner bisa dicegah, namun sering pasien datang dalam kondisi sudah terlambat. Yang harus disadari betul, penyakit jantung koroner itu bisa dicegah yang faktor risikonya ada dan bisa kita tangani. Kita punya banyak waktu untuk mencegah seseorang sampai jatuh ke penyakit jantung koroner,” kata Dokter Spesialis Penyakit Dalam – Kardiovaskular RS Medistra ini.

Sri menegaskan, perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat soal penyakit jantung koroner. “Kadang-kadang kan pasien cuma tahu tapi diabaikan, kesadarannya itu yang harus ditingkatkan,” pesannya mengingatkan. ■ (ndy/mp)

Pemerintah Harus Lebih Selektif Kirim TKI ke Luar Negeri



Anggota Komisi XI DPR RI, Willgo Zainar foto bersama dengan Kanwil dan Bea Cukai Provinsi NTB.

Pemerintah diminta dalam mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) benar-benar yang sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Baik persyaratan administratif maupun teknis telah melalui proses yang normal, artinya tidak ada faktor yang akhirnya menjadi TKI ilegal.

“Prosesnya harus benar. PJTKI juga harus selektif tidak hanya “menjual” manusia, kemudian tidak berfikir bagaimana keselamatan dan perlindungannya. Pemerintah Pusat, Pemda, dan PJTKI dan pihak swasta harus bekerja sama agar tidak terus berulang terjadi kasus TKI yang meninggal di luar negeri,” ungkap Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar usai menggelar pertemuan dengan Kanwil Kemenkeu, Kanwil BPK, BPKP dan Pemprov NTB di Mataram, baru-baru ini.

Ketika membahas soal laporan bea masuk, Kanwil Bea Cukai NTB memaparkan bahwa total penerimaan bea masuk dari NTB jumlahnya kecil. Alasannya kebanyakan penumpangnya TKI, yang tidak membawa barang-barang yang dikenakan bea masuk.

Dari komoditas impor yang paling sering adalah jenazah TKI yang tidak terkena bea masuk. Jumlahnya cukup banyak seminggu bisa tiga sampai lima jenazah, karena kecelakaan kerja atau kasus lainnya. Jenazah TKI ini termasuk kategori Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) termasuk tanpa beban biaya.

Willgo yang juga anggota Dewan Dapil NTB mengakui, benar dari NTB ada sekitar 50 ribuan TKI paling besar ke Malaysia. Kebanyakan skill (keterampilannya) tidak disiapkan dan berujung TKI ilegal, sehingga dikejar-kejar petugas. Atas berbagai kasus tersebut, pemerintah harus bertindak lebih tegas, sehingga kasus pengiriman jenazah TKI tidak terjadi lagi. ■

BKSAP Sambut Niat Oman Tingkatkan Investasi

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyambut baik keinginan Oman untuk meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Indonesia. Menurutnya, ada beberapa sektor potensial yang dapat dikembangkan guna peningkatan ekonomi kedua negara.

“Saat ini sedang dilakukan *technical survey* dari pihak Oman untuk serius investasi di Indonesia dan kami menyambut baik kegiatan tersebut guna meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Oman,” ungkap Nurhayati saat menerima Duta Besar Kesultanan Oman untuk RI Nazzar bin Al-Julanda Alsaïd di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (08/11/2017).

Lebih lanjut Nurhayati menyampaikan, saat ini pemerintah Indonesia dan pemerintah Oman sedang menjajaki sektor pertanian dan industri yang dinilai berpeluang besar untuk menggenjot investasi di Indonesia maupun kedua negara.

Ia menilai, dengan terjalinnya hubungan baik diantara keduanya, maka ini berpotensi menjadi peluang yang

bagus bagi Indonesia memasuki pasar ekspor Timur Tengah. Sebaliknya, Indonesia juga merupakan market yang besar bagi Oman. Karena itu, diharapkan kedua pemerintah memberikan dukungan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Selain itu, kita juga dorong peningkatan *people to people contact* supaya lebih banyak orang Oman yang berkunjung ke Indonesia sebagai wisatawan,” sambung politisi Demokrat ini.

Selain peningkatan hubungan bilateral, keduanya juga membahas situasi politik terkini di masing-masing kawasan, seperti di Yaman dan Myanmar.

Selaku Presiden International Humanitarian Law (IHL), Nurhayati berharap ketegangan yang terjadi dapat segera mencair. Ia juga mendorong Oman untuk melakukan lobi-lobi politiknya di negara semenanjung guna menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan teluk. ■

(ann/sc)



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menerima Duta Besar Kesultanan Oman untuk RI Nazzar bin Al-Julanda Alsaïd.



Prosesi pelantikan dan mutasi jajaran pejabat di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, di ruang rapat Setjen DPR RI.

Plt Sekjen DPR RI Lantik Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Prosesi pelantikan dan mutasi jajaran pejabat di setiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan dan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi dan sekaligus karir pegawai. Pelantikan pejabat ini dimaksudkan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figure-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu.

Hal tersebut diungkapkan Plt Sekjen DPR RI, Damayanti usai melantik ketiga pejabat tinggi pratama di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI di ruang Sekjen DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (14/11/2017).

“Pertimbangan utama yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai adalah kompetensi, pengabdian, dan komitmen terhadap tugas serta tanggung jawab kepada negara. Oleh karena itu, setiap pejabat hendaknya mempunyai kemauan yang kuat untuk memiliki wawasan yang luas dan siap membantu Pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Dengan

demikian diharapkan para pejabat dapat menjadi roda penggerak organisasi. Dengan kata lain semoga tiga pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru saja dilantik ini dapat memberikan dukungan positif bagi kinerja pegawai, sehingga semakin kompak dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, wartawan serta masyarakat luas,” papar Maya, begitu Damayanti biasa disapa.

Maya meyakini bahwa ketiga pejabat yang baru saja dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik, karena sudah melakukan berbagai proses seleksi dimana panitia seleksinya diketua oleh Kepala BK DPR RI, Johnson Rajagukguk.

Lebih lanjut Maya menegaskan agar pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru saja dilantik ini agar segera menyusun program kerja untuk meningkatkan kualitas kinerja dengan mempedomani nilai-nilai organisasi yang Religius, Akuntabel, Profesional, dan Integritas (RAPI). Bahkan Maya juga mengingatkan bahwa Pimpinan Setjen dan BK DPR RI akan terus melakukan evaluasi terhadap tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada ketiganya.

Adapun ketiga pejabat yang baru saja dilantik itu adalah Djustiawan Widjaya yang mendapat promosi, dari jabatan sebelumnya Kepala Bagian Penerbitan DPR RI menjadi Kepala Biro Umum Setjen dan BK DPR RI. Sementara kedua pejabat eselon II yang mengalami mutasi kali ini adalah Djaka Dwi Winarko yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pemberitaan Parlemen mengalami mutasi untuk menempati jabatan Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI. Bertukar posisi dengan Yohannes.O.I Tahapari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan, mengalami mutasi menjadi Kepala Biro Pemberitaan Parlemen. ■

(Ayu,mp/iv)



Tim Kunker Komisi X DPR dipimpin Ketua Djoko Udjianto meninjau sarana dan prasarana perpustakaan di Bengkulu, Senin (13/11). Foto: Oji

Tim Komisi X yang di Pimpin Wakil Ketua Sutan Adil Hendra meninjau ruang laboratorium SMKN 5 Pangkal Pinang saat Kunjungan Kerja Ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (14/10).Foto : Runi



Ketua Pengurus Koperasi Setjen dan BK DPR RI M. Djazuli memimpin Rapat Anggota Khusus Koperasi di Gedung DPR, Senin, (13/11) foto : jayadi